

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:7). Laporan keuangan sebagai alat sarana perkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi mereka. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Akuntansi berbasis akrual mempunyai keunggulan bahwa informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (Trisnayani, 2016). Namun, akuntansi akrual juga memiliki kelemahan. Penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan istilah manajemen laba.

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja keuangan (Sulistyanto, 2008). Manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi. Apalagi jika melihat rekayasa tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka – angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi. Hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi stakeholder, karena tidak dapat memperoleh informasi yang valid dan memadai untuk memastikan apa yang seharusnya dilakukan (sulistyanto, 2008).

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan *debtholder*, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Secara konseptual hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menghasilkan hubungan yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan agensi (*agency problem*) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Kasus perusahaan perbankan di Indonesia yang mempraktikkan manajemen laba yaitu pada PT. Bank Bukopin Tbk (BBKP). Laporan

keuangan Bank Bukopin ini diaudit oleh auditor yang terafiliasi dengan salah satu *big four auditor internasional* ERNST & Young, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkro dan Surja. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang tercatat di BEI telah ditemukan fenomena manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan tersebut. manajemen secara terang-terangan merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017 hal tersebut dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Table 1.1

**Laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015-2017**

Tahun	Laba	Pendapatan
2015-2016 (sebelum revisi)	1,086,605	1,059,765
2016-2017 (setelah direvisi)	183,536	317,884

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2015-2016 (sebelum revisi), laba bersih Bank Bukopin sebesar Rp 1,08 triliun, setelah melakukan revisi pada tahun 2016-2017 laba bersih Bank Bukopin mengalami penurunan menjadi Rp. 183,56 miliar. Sedangkan untuk pendapatan yang didapat dari pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit mengalami penurunan menjadi Rp. 317,88 miliar dari sebelumnya Rp. 1,06 triliun (Maulidah, 2020)

Praktik manajemen laba yang dilakukan PT. Bukopin Tbk (BBKP) memberikan tanda terjadinya penurunan kualitas audit. Praktik manajemen laba inilah yang membuat investor akan merasa ragu akan kualitas dan kredibilitas para auditor dalam mencegah terjadinya praktik manajemen laba. Kualitas auditor

menjadi suatu objek yang dapat menjadi perhatian khusus dari para pemegang saham, pemerintah serta seluruh pengguna laporan keuangan (Maulidah, 2020)

Terjadinya praktik manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangan membuktikan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kurang efektifnya proses monitoring atas tindakan pihak manajemen perusahaan. Padahal laporan keuangan sangat penting dimata pihak eksternal karena dapat menilai kinerja suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada para investor dan pemegang saham dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan sahamnya serta dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, utang, modal, hasil, biaya dan laba (Feronika, 2020)

Menurut teori keagenan untuk meminimalkan terjadinya tindakan manajemen laba, maka perusahaan sebaiknya perlu menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan, mekanisme corporate governance dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik atau pemegang saham memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh agen atau manajer (Trisnayanti, 2016). Menurut Effendi (2016:03) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamatan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini diprosikan

dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, meningkatkan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Wirianti, 2020). Secara teoritis, pihak manajemen yang memiliki persentase yang tinggi dalam kepemilikan saham akan bertindak layaknya seseorang yang memegang kepentingan dalam perusahaan. Asumsi ini sejalan dengan teori berbasis kontrak (*contracting based theory*) yang menunjukkan bahwa manajemen akan efisien dalam memilih metode akuntansi yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Chistie dan Zimmerman, 1994). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan, hal ini akan mempersulit manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Menurut hasil penelitian Dewi (2020), menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian oleh Astari dan Suryanawa (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Selain adanya kepemilikan manajerial sebagai suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan, kepemilikan institusional juga diduga mampu memberikan mekanisme monitoring serupa dalam perusahaan. Menurut Nuraina (2012:116) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta institusi lainnya yang terdapat di perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiyanto (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Suryanawa (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba, hal ini berarti semakin meningkatnya kepemilikan kepemilikan institusional maka semakin menurunnya tindakan manajemen laba.

Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Sulistiyanto, 2008:141). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2019), menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Anggraini (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016:48). Komite audit mempunyai

tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas proses pelaksanaan *good corporate governance* suatu perusahaan, khususnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan usaha secara beretika, dan melaksanakan secara efektif terhadap benturan kepentingan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit (Feronika, 2020). Menurut Wati (2019) menemukan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Sunarsih (2017) menyatakan bahwa jumlah Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kompensasi bonus merupakan imbalan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan baik berupa uang maupun barang (Malayu, 2017:119). Sistem pemberian kompensasi bonus memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Kompensasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba (Sulistyanto, 2008:88). Jika laba rendah daripada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dan mentransfer laba masa depan menjadi laba sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus. Menurut hasil penelitian Andhani (2019), menemukan bahwa kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Pujiningsih (2011) menyatakan variabel kompensasi bonus menunjukkan hasil yang positif.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan hasil sebelumnya terdapat beberapa *research gap*. Penulis bertujuan mengadakan penelitian dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah anggota audit, dan kompensasi bonus dengan tujuan untuk membuktikan *gap* yang muncul. Penulis mengambil sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang berskala besar sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Selain itu memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena bank merupakan cerminan kepercayaan investor pada stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan suatu negara dan sudah banyak bank yang go public sehingga memudahkan dalam melihat posisi keuangan dan kinerja suatu bank serta meningkatnya harga saham perbankan di Indonesia menunjukkan harapan besar investor pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “ **Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Jumlah Anggota Audit, dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba ?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba ?
- 4) Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba ?
- 5) Apakah kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
- 2) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
- 3) Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen laba.
- 4) Untuk menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap manajemen laba.
- 5) Untuk menguji pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba.

1.4 Kegunaan Penelitian

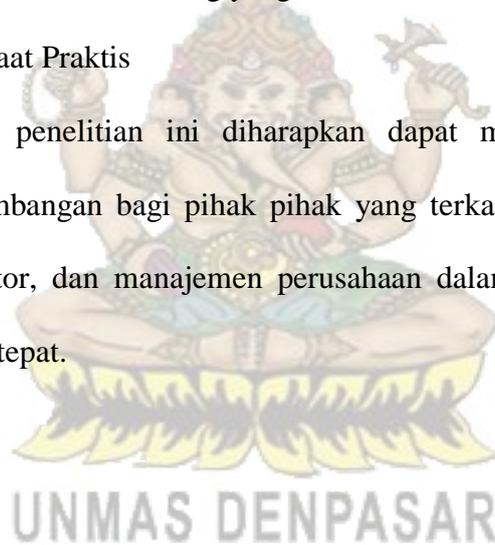
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan lebih luas kepada mahasiswa mengenai manajemen laba dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi kepada mahasiswa yang meneliti dibidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bahan pertimbangan bagi pihak pihak yang terkait seperti investor, calon investor, dan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antarkepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Konsep *agency theory* menurut Santoso (2015:8) yang diartikan sebagai suatu kontrak antara *principal* (pemegang saham mayoritas utamanya) dengan agen (dalam hal ini adalah manajer perusahaan) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal*, sebagai pemilik perusahaan berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh pemegang saham padanya, untuk

kemakmuran dan keuntungan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Untuk itu agen dalam hal ini manajer perusahaan akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya, dalam situasi seperti ini, dapat terjadi yang ditunjuk untuk menjalankan operasional perusahaan tidak menjalankannya dengan baik atau bertindak untuk kepentingan sendiri.

Menurut Mayadi (2017) menyatakan bahwa pemegang saham sebagai pihak *principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*.

Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham, hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi

dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi merepresentasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono dalam Wiyarsi, 2012).

Manajemen laba didasari oleh adanya *theory agency* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab timbulnya manajemen laba. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Sebagaimana pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik, hal ini akan memberikan

kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba, sehingga akan menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sudiyanto, 2016). Terkait dengan masalah asimetri informasi tersebut, dimana agen lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan sehingga agen akan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kepentingan pribadinya, maka perlu diterapkannya *Good Corporate Governance* pada perusahaan sehingga dapat meminimalisir tindakan manajemen laba serta menciptakan perusahaan perusahaan yang lebih transparan dan sehat melalui adanya tindakan monitoring (Feronika, 2020).

2.1.2. Manajemen Laba

1) Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Supriono, 2018:123). Menurut Andika (2015) menyatakan bahwa *earnings management* terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta

untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan.

2) Faktor-faktor

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan (Sulistiyanto,2008:45) adalah :

1. Bonus *Plan hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada di atas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapatkan bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*.

2. *Debt to Equity hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang mempunyai *rasio debt to equity* cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

3. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba.

Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti, mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

3) Motivasi Manajemen Laba

Scot (2000:302) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

a) *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka.

b) *Political Motivations*

Perusahaan public mengurangi laba yang dilaporkan. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan public yang mengakibatkan pemerintah menetapkan aturan yang lebih ketat.

c) *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

d) Pergantian *CEO*

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Demikian juga dengan *CEO* yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba agar tidak diberhentikan.

e) *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan

yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

f) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor agar investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

4) Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scoot (2000) dapat dilakukan dengan cara :

a) *Taking a Bath*

Taking a Bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebaskan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

b) *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastic dapat diatasi dengan menagmbil laba periode sebelumnya.

c) *Income Maximizations*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximizations* bertujuan untuk melaporkan *net income*

yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

d) *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

e) *Offsetting Extraordinary/Unusual Gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan *trend* laba.

f) *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

5) Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba menurut Feronika (2020) dapat dilakukan dengan tiga Teknik, yaitu :

a) Manfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkira

an) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

b) Menguruk Metode Akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh merubah depresiasi garis lurus.

c) Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

6) Alasan dilakukan manajemen laba

Menurut Feronika (2020) alasan dilakukannya manajemen laba dikarenakan hal berikut :

a) Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.

b) Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan memberi posisi bargaining yang relative baik dalam negosiasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan perusahaan.

2.1.3. *Corporate Governance*

1) Definisi dan Tujuan *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)* *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan definisi *good corporate governance* diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkaitan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan Komisaris, dan dewan direksi demi

tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Widiasih dalam Feronika, 2020).

2) Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)* adalah :

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

3) Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI,2001)* adalah sebagai berikut:

- a) *Fairness* (keadilan)

Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

b) *Transparency* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

c) *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

d) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab social terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari

penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

e) *Independency* (kemandirian)

Sebagai tambahan prinsip dalam pengelolaan BUMN, artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

2.1.4. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti market of corporate control, external auditors, rating agencies dan kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah. Indonesia merupakan Negara dengan sistem hukum yang lemah dan terutama control of corruption-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan. Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari stakeholders yang berbeda termasuk pemilik atau investor. Artinya, pemilik yang berbeda

mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014).

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen dan struktur dewan. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014). Dalam penelitian ini mencakup 2 kategori yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

2.1.4.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Topowijaya dan Sri, 2016:156). Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris dimasukan dalam kepemilikan manajerial (*managerial Ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan, hal ini akan mempersulit manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode

pengamatan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer dilibatkan dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajara dengan pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepentingan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran yang berbeda pula, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajere yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelolanya (Feronika, 2020).

2.1.4.2. Kepemilikan Instutisional

Menurut Nuraina (2012:16) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintahan, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, serta institusi lainnya yang terdapat di perusahaan. Menurut Feronika (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki

peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Yanti, 2017).

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan. Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan investor institusional merupakan investor yang berpengalaman dan memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi (Astawa, 2019).

Investasi institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka Panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif untuk mengatur laba sekarang. Kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku *opportunities* manajemen yang memanfaatkan manajemen laba. Untuk kepentingan pribadinya, yang mungkin mengakibatkan kepentingan pihak lain terabaikan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer

dalam hal manajemen laba yang dapat mengurangi kepentingan pihak lain (*stakeholder*), (Fenornika, 2020).

2.1.5. Komisaris Independen

Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *corporate governance* (Effendi, 2016:16).

Menurut Sulistyanto, (2008:128) ada beberapa misi yang diemban Komisaris Independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektifitas dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Kedua, mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* di Indonesia. Ketiga, bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Untuk itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Komisaris Independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan :

- a. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi itu.
- b. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, khususnya :
 1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
 2. Perlakuan yang adil untuk pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lain.
 3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil.
 4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
 5. Menjamin akuntabilitas organ perseorangan.

2.1.6. Komite Audit

Menurut Sulistyanto, (2008:125) secara konseptual komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Untuk itu ada beberapa aspek penting pengawasan yang harus dilakukan komite audit untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab, yaitu :

a. Penyusunan laporan keuangan.

Secara konseptual pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan adalah manajer dan dewan Komisaris. Sedangkan komite audit melaksanakan pengawasan Independen atas proses penyusunan laporan keuangan yang dibuat manajer telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka Panjang yang sesungguhnya. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka komite audit berperan dan mempunyai tanggung jawab :

1. Melakukan pengawasan apakah proses penyusunan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan keuangan.

2. Menelaah apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan serta konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh komite audit.
 3. Melakukan pengawasi terhadap pelaksanaan audit laporan keuangan oleh auditor eksternal dan menilai mutu pekerjaan dan kewajaran biaya audit (auditor's fee) yang diajukan oleh auditor eksternal.
- b. Manajemen risiko dan pengendalian.

Secara konseptual manajer dan dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab terhadap manajemen risiko dan kontrol perusahaan. Sedangkan komite audit memberikan pengawasan Independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, khususnya untuk berbagai hal yang mempunyai potensi risiko, pemberdayaan sistem pengendalian intern, serta pemantauan terhadap proses pengawasan yang dilakukan auditor internal. Apabila menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku maka komite audit mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada dewan Komisaris. Untuk itu komite audit mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta mengidentifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk meminimalisasi risiko.

2. Menilai ruang lingkup pemeriksaan auditor internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang berisiko dan memerlukan pengendalian telah dikerjakan.
3. Memastikan bahwa manajer telah melaksanakan semua rekomendasi mengenai risiko dan pengendalian itu.

c. Corporate governance.

Secara konseptual direksi dan dewan Komisaris merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan corporate governance. Sedangkan komite audit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan Independen atas proses pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan, khususnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan usaha secara beretika, dan melaksanakan secara efektif terhadap benturan kepentingan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer perusahaan. Untuk itu komite audit mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses penerapan corporate governance.
2. Memastikan bahwa manajer senior secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance.
3. Memonitor bahwa code of conduct telah dilaksanakan secara konsekuen.

4. Memahami semua pokok persoalan dan issues yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial maupun non finansial perusahaan.
5. Memantau bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.
6. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan corporate governance dan temuan lainnya.

Oleh sebab itu secara singkat fungsi komite audit adalah untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewenganpenyelewengan. Fungsi lainnya adalah untuk memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat Independensinya dari manajer. Hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik.

2.1.7. Kompensasi Bonus

2.1.7.1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Malayu dalam Elfira, 2014).

Menurut William dan Keith (1982), kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikan, baik upah per jam atau gaji periodic didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Elfira (2014) juga menjelaskan hal yang senada bahwa kompensasi merupakan segala sesuatu yang dikontribusikan atau dianggap sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.7.2. Tujuan Kompensasi

Menurut Elfira (2014) tujuan kompensasi yaitu sebagai berikut :

1) Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Kepuasan Kerja

Dengan kompensasi karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status social, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3) Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.

2.1.7.3. Asas Kompensasi

Menurut Elfira (2014) asas kompensasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut

1) Asas Adil

Besarnya kompensasi bonus yang diberikan kepada karyawan harus disesuaikan dengan prestasi, jenis, resiko dan tanggung jawab, serta jabatan pekerja yang memenuhi persyaratan internal konsistensi.

2) Asas Layak dan Wajar

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normative yang ideal. Tolok ukur layak adalah relative, penetapan besarnya kompensasi bonus didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku.

2.1.7.4. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kompensasi

Menurut Elfira (2014) berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan

(permintaan)maka kompensasi relative kecil, begitupun sebaliknya.

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan untuk membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar.
3. Serikat buruh/organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi semakin besar.
4. Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin besar.
5. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres. Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada karyawan.

2.1.7.5. Jenis – Jenis Kompensasi

Kompensasi mencakup hal – hal seperti gaji, bonus dan tunjangan atau tambahan penghasilan. Gaji adalah sautu pembayaran tetap sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk periode tersebut dan tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan kepada manajer (Elfira, 2014).

2.1.7.6. Perencanaan Bonus

Ada 3 aspek penting dalam pengelompokan program pemberian bonus:

1. Dasar kompensasi, yaitu bagaimana pemberian bonus ditentukan. Dasar yang paling umum adalah :
 - a. Harga saham
 - b. Kinerja berbasis biaya, pendapatan, laba atau investasi
 - c. Balanced scorecard
2. Sumber kompensasi, yaitu darimana pendanaan bonus berasal. Sumber kompensasi yang paling umum adalah laba dan sumber perusahaan keseluruhan berdasarkan total laba perusahaan.
3. Cara pembayaran, yaitu bagaimana bonus akan diberikan. Cara umum adalah tunai dan saham.

Kompensasi bonus pada tahun tertentu yang diukur dengan dummy, dimana: 1 = terdapat pemberian kompensasi bonus kepada manajemen 0 = tidak terdapat pemberian kompensasi bonus kepada manajemen (Elfira, 2014).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang

menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan berikut ini hasil pengujian dari para penelitian terdahulu diantaranya ada penelitian dari Pujiningsih (2011), penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, praktik corporate governance, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba adalah komite audit dan kompensasi bonus. Perusahaan yang membentuk komite audit menunjukkan hasil negatif, sehingga semakin tinggi pembentukan komite audit maka semakin rendah praktik manajemen laba dalam perusahaan itu. Variabel kompensasi bonus menunjukkan hasil yang positif, jadi apabila perusahaan memberikan kompensasi bonus kepada manajemen yang tinggi, maka praktik manajemen laba juga akan semakin tinggi. Variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan kualitas audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur.

Suryanawa (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial

dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba, hal ini berarti semakin meningkatnya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional maka semakin menurunnya tindakan manajemen laba, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan pada manajemen laba, hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan maka semakin meningkatnya tindakan manajemen laba.

Andhani (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kompensasi bonus, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Konsentrasi mekanisme corporate governance diukur menggunakan dua variabel (dewan Komisaris Independen, dan jumlah anggota komite). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan Komisaris, jumlah anggota audit, leverage, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba sedangkan kompensasi bonus dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Sunarsih (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas auditor, jumlah komite audit dan Pendidikan ketua komite audit terhadap earaning management. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor dan pendidikan audit ketua komite tidak berpengaruh terhadap jaring manajemen laba, sedangkan jumlah Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Bhaskara (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba. Konsentrasi *corporate governance* diukur menggunakan 3 variabel (kepemilikan institusional, Komisaris Independen, dan dewan direksi). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris Independen dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Wati (2019) , melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2018. Mekanisme *good corporate* yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Sudiyanto (2016), melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan leverage terhadap manajemen laba dan konsekuensinya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang melakukan *right issue* di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan manajemen laba berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kirana (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2018. Mekanisme corporate governance yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan variabel kepemilikan

manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dewi (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, komposisi komisaris independen, komposisi dewan direksi dan komposisi komite audit terhadap manajemen laba. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, variabel komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, variabel komposisi dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan variabel komposisi komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Yustiningarti (2017), melakukan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi, mekanisme corporate governance dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Manajemen laba diukur dengan the modified jones model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan asimetri informasi, mekanisme corporate governance dan kompensasi

bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, kompensasi bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, dan mekanisme corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Lemma (2018), melakukan penelitian mengenai dampak kepemilikan institusional dan persaingan pasar produk terhadap manajemen laba (baik berbasis akrual maupun riil) menggunakan data dari perusahaan non-keuangan di 41 negara di seluruh dunia untuk periode 1995-2016. Setelah mengontrol penentu manajemen laba tingkat perusahaan yang didokumentasikan oleh penelitian sebelumnya, variabel indikator industri dan negara, ditemukan bukti kuat (tidak ada bukti) bahwa manajemen laba akrual (nyata) meningkat (terkait) dengan persentase kepemilikan institusional. Sementara kepemilikan institusional tampaknya tidak berpengaruh pada manajemen laba riil, itu secara signifikan menekankan manajemen laba akrual. Ditemukan juga persaingan pasar produk berhubungan positif dengan manajemen laba akrual, meskipun secara statistik signifikan hanya jika proxy Herfindahl-Hirschman Index (HHI) digunakan. Terakhir, persaingan pasar produk secara signifikan berhubungan negatif dengan manajemen laba riil, menggunakan dua dari tiga proksi persaingan pasar produk. Hanya ketika digunakan kebalikan dari jumlah perusahaan dalam suatu industri (NUMB) ditemukan hubungan positif antara persaingan pasar produk dan

manajemen laba riil. Persaingan pasar produk muncul untuk menonjolkan akrual tetapi melemahkan manajemen laba riil.

Al-Sartawi (2019), melakukan penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dan tingkat tata kelola perusahaan di Kerajaan Bahrain. Model analisis multi-regresi digunakan untuk menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional. Selain itu, karakteristik perusahaan tertentu dikendalikan untuk mempelajari pengaruh investasi institusional terhadap tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan tingkat tata kelola perusahaan. Para peneliti berasumsi bahwa tata kelola perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk yang akan mengurangi kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan lainnya sebagai hasilnya. Studi ini menawarkan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan, dimana perusahaan sebaiknya mempekerjakan auditor eksternal yang berasal dari Big 4, karena mereka akan mendorong dan berkontribusi untuk meningkatkan level tata kelola perusahaan. Selain itu, lokakarya dan kursus pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kode tata kelola perusahaan di Bahrain.

Sajjad (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan persaingan pasar produk pada praktik manajemen laba di ekonomi Pakistan yang sedang berkembang. Penelitian ini menganalisis sampel dari 84 perusahaan non-keuangan dari tahun 2010 hingga 2015 terdaftar di Bursa Efek Pakistan dengan menggunakan

analisis linier berganda. Hasilnya menunjukkan perusahaan itu variabel tata kelola yaitu ukuran dewan perusahaan, direktur independen, rapat dewan dan kualitas audit digabungkan secara negative akrual diskresioner. Namun, kepemilikan institusional dan CEO dualitas memiliki hubungan positif dengan akrual diskresioner. Selanjutnya, persaingan pasar produk secara signifikan dan berhubungan positif dengan akrual diskresioner. Oleh karena itu, dapat disimpulkan yang dimiliki tata kelola perusahaan dan persaingan pasar produk pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba di Pakistan.

Anggraini (2019), melakukan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (Annual Report). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien determinasi R^2 diperoleh sebesar 14,7% yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 14,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulan dalam penelitian ini

menunjukkan semakin banyak komisaris independen maka semakin turun praktek manajemen laba, dan dewan pengawas syariah hanya sebagai pemenuhan regulasi saja.

NGO (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Vietnam. Data penelitian dikumpulkan dari seluruh 745 emiten di pasar saham Vietnam selama empat tahun, dari 2015 hingga 2018. Setelah mengeluarkan perusahaan yang tidak lolos, terdapat 216 perusahaan dengan 864 observasi. Dengan bantuan software khusus Stata 15, dampak karakteristik komite audit (melalui variabel independen dan variabel kontrol seperti independensi komite audit, ukuran komite auditing, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite auditing, ukuran perusahaan, financial leverage, dan operasional cash arus) ke manajemen laba melalui model regresi multivariat ditentukan. Hasil penelitian dari emiten Vietnam selama periode ini menunjukkan bahwa ukuran dan keahlian komite audit berbanding terbalik dengan discretionary accruals yang merepresentasikan manajemen laba. Hasil penelitian juga mengidentifikasi hubungan positif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba, serta hubungan terbalik antara leverage keuangan, arus kas bersih dari operasi operasi dan manajemen laba. Namun hasil regresi multivariat tidak menemukan bukti yang jelas adanya hubungan antara independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah komite audit, kompensasi bonus sebagai variabel independen, dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya terletak pada populasi dan sampel yang digunakan yaitu pada perusahaan perbankan. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada tahun diadakannya penelitian, dimana penelitian ini mengambil tahun penelitian 2017-2020.

